



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**KANTOR REGIONAL III**  
**BANDUNG**



# RENCANA KERJA

TAHUN  
2020

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia serta ridlho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020.

Pada dasarnya Rencana Kerja Kanreg III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 ini mengacu kepada program dan kegiatan di Lingkungan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Semoga dokumen Rencana Kerja Kanreg III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran program dan kinerja kegiatan pada Tahun 2020.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Kanreg III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020.

Bandung, 27 Januari 2020

Kepala Kantor Regional III  
Badan Kepegawaian Negara



Hj Inas Sukmariah, S.Sos, MAP  
NIP. 19660509 198603 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C. RUANG LINGKUP .....	1
BAB II ARAH KEBIJAKAN KANREG III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.....	2
BAB III RENCANA KERJA .....	5
A. SASARAN TAHUN 2020 .....	5
B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2020 .....	6
C. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020 .....	8
D. PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 .....	9
BAB IV PENUTUP .....	13
LAMPIRAN .....	14

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Manajemen ASN, pada tahun anggaran 2020 Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024, serta Perpres Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Renja ditetapkan pada tahun perencanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Manajemen ASN pada tahun 2020.

### **C. RUANG LINGKUP**

Rencana Kerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Arah kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Tahun 2020;
2. Program Prioritas Tahun 2020;
3. Rencana Kerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah “Mewujudkan SDM Unggu Indonesia Maju.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh program yang akan dilaksanakan

(money follow program), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven) atau karena tugas fungsi organisasi (money follow function). Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RKP 2020 adalah : pendekatan tematik-holistik yaitu untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) yang terkait, pendekatan integratif yaitu kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi, dan pendekatan spasial yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian Negara

#### **1. Peranan Strategis Kantor Regional III BKN dalam Pengelolaan ASN**

Bersama-sama dengan KASN dan LAN (dengan fungsi dan tugas masing-masing), Kantor Regional III BKN mempunyai peranan penting dan strategis dalam pengelolaan ASN. Jumlah ASN saat ini yang ada di Kantor Regional III BKN sewilayah Jabar Banten Sekitar 391.215 orang. Apabila jumlah ASN yang besar ini dikelola dengan efisien dan efektif maka Kantor Regional III BKN akan memberikan andil besar dalam mencapai tujuan bernegara. Sebaliknya apabila Kantor Regional III BKN tidak mampu mengelola dengan baik jumlah ASN yang sangat besar ini, maka Kantor Regional III BKN juga memberikan andil besar dalam menghambat kemajuan bangsa.

Peran yang penting dan strategis Kantor Regional III BKN itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu mandate dan tugas yang diberikan pada Kantor Regional III BKN adalah merevitalisasi sistem dan manajemen birokrasi sehingga lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Juga diamanatkan Kantor Regional III BKN untuk melakukan pengembangan kualitas modal manusia sebagai pendorong utama (*prime mover*) reformasi birokrasi. Dalam melakukan semua itu secara eksternal Kantor Regional III BKN harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan strategis. Ada 3 (tiga) isu strategis bidang aparatur negara sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2) pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (3) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di samping itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin mutakhir; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas sumber daya aparatur. Secara internal, juga ada tiga faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan supaya Kantor Regional III BKN mampu merealisasikan potensi dan tugasnya. Ketiga faktor itu adalah: 1) kompetensi dan profesionalitas modal manusia, 2) budaya organisasi yang mendorong pada kemajuan, peningkatan produktivitas dan inovasi, dan 3) kualitas kepemimpinan di dalam tubuh Kantor Regional III BKN sendiri.

## 2. Peran Strategis Kantor Regional III BKN

Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda dan kepentingan nasional Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu program unggulan. Kantor Regional III BKN perlu ambil bagian dan memberikan kontribusi penting dalam agenda nasional tersebut untuk Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, dengan sasaran tersebut, maka kontribusi mewujudkan manajemen talenta nasional dan ASN yang Profesional. Dalam bingkai roadmap reformasi birokrasi ini maka ada dua aspek penting yang melekat dan dapat disumbangkan Kantor Regional III BKN yaitu: kompetensi organisasi dan focus organisasi. Dalam hal kompetensi organisasi, Kantor Regional III BKN perlu senantiasa meningkatkan kompetensi dan keunggulannya sepanjang waktu. Dalam konteks focus organisasi, maka Kantor

Regional III BKN harus memilah dan memilih skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misi, dengan memberikan focus pada penanganan reformasi birokrasi.

### 3. Mencegah dan Memberantas Korupsi dalam Tubuh BKN

Sasaran strategis nomor enam merupakan sasaran strategis yang baru yang membedakannya secara signifikan dengan dua Renstra sebelumnya. Keberadaan sasaran strategis nomor enam ini juga mengejawantahkan salah satu arah kebijakan reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih yang bebas dari KKN. Ada 5 indikator Kinerja Utama yang terkait dengan upaya pengembangan dan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu adalah persentase PNS yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (yang sudah berketetapan hukum, minimal tingkat pengadilan negeri) dalam satu instansi, 2) persentase nilai kerugian keuangan negara terhadap nilai belanja instansi dalam satu tahun fiskal, 3) adanya sistem manajemen anti suap (penerapan SNI ISO 37001) dalam setiap instansi, 4) adanya unit pengendalian gratifikasi dalam setiap instansi, dan 5) adanya mekanisme penanganan keluhan publik yang responsif dan efektif terkait perkara korupsi.

## BAB III RENCANA KERJA

### A. SASARAN TAHUN 2020

Sasaran Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara yang akan dicapai pada tahun 2020 melalui 3 (tiga) program (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN dan (3) Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara secara rinci dengan penerapan metode balance scorecard seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1 Sasaran Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara  
Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama		Satuan	2020
<i>Stakeholder Perspective</i>			
<b>SS.1 Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN</b>			
1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai Standar Tata Kelola Manajemen ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	%	5
2	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	%	85
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>			
<b>SS.2 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima</b>			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	Indeks	85
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	Indeks	85
<i>INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)</i>			
<b>SS.3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN</b>			
5	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Manajemen ASN yang Mendukung Pelayanan Kantor Regional III BKN.	%	100
<b>SS.4 Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN</b>			
6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasikan dengan SIASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	%	90
<b>SS.5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN</b>			
7	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	%	90

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama		Satuan	2020
<b>SS.6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN</b>			
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN	%	80
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>			
<b>SS.7 Terwujudnya ASN BKN Kantor Regional III yang kompeten</b>			
9	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	Nilai	100
<b>SS.8 Terwujudnya sistem informasi ASN Kantor Regional III yang handal dan mudah diakses</b>			
10	Persentase unit kerja di lingkungan Kantor Regional III BKN yang menerapkan sistem informasi yang terstandar	%	100
<b>SS.9 Terwujudnya Birokrasi Kantor Regional III BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi Pelayanan Prima</b>			
11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN	Nilai	80
12	Hasil Evaluasi terhadap SAKIP Kantor Regional III BKN	Nilai	80
13	Level Maturitas SPIP Kantor Regional III BKN	Nilai	3
14	Indeks Pelaksanaan Sistem Merit Kantor Regional III BKN	Nilai	3,5
<b>SS.10 Terkelolanya Anggaran Kantor Regional III BKN secara efisien dan akuntabel</b>			
15	Persentase Pelaksanaan Kualitas Anggaran Kantor Regional III BKN	%	85
16	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.	%	100

## B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2020

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara akan mendukung 4 (empat) prioritas yaitu:

### 1. Pengurangan / Pemadatan Tanah

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2020 akan mengadakan pemagaran, pengurangan/pemadatan tanah, sebenarnya pada tahun 2018 untuk pengurangan/pemadatan tanah sudah dilaksanakan. Cuma baru seperempatnya dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Maka pada tahun 2020 untuk pengurangan/pemadatan tanah akan dilanjutkan, berikut pembangunan gedung

## **2. Renovasi Rumah Jabatan**

Pada tahun 2020 Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara akan mengadakan renovasi rumah jabatan sebelumnya dilakukan alih status terlebih dahulu dari rumah dinas beralih status menjadi penyimpanan tata naskah yang dikirim dari BKN Jakarta, dikarenakan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tidak memiliki gedung penyimpanan takah untuk tata naskah sebanyak itu.

## **3. Pengadaan Kendaraan Roda 4 (1 unit)**

Dan pada tahun 2020 Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara akan mengadakan pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit.

## **4. Pelayanan Mobile**

Kantor Regional III BKN akan meluncurkan program Pelayanan Mobile , yaitu pelayanan dengan menggunakan mobil khusus dengan mengunjungi instansi-instansi se-wilayah kerja Kantor Regional III BKN Tujuannya Efisien dan efektif karena setiap PNS dapat langsung menerima layanan kepegawaian dari Kantor regional III BKN Layanan Kepegawaian masih sebatas layanan Mutasi, Pensiun, dan Rekonsiliasi Data Kepegawaian

## **5. Membangun SIPEDA (Sistem Informasi PNS Yang Meninggal Dunia).**

Maksud dan tujuan dibangun aplikasi ini adalah agar kita dapat menetapkan SK pensiun janda/duda (sekarang BKN menetapkan nota pertimbangan teknis) tanpa harus menunggu usulan dari para janda/duda tersebut. Kita akan menggunakan dokumen yang sebelumnya pernah disampaikan ke PT.Taspen pada saat pengurusan asuransi kematian, untuk keperluan penetapan nota pertimbangan teknis pensiun, selanjutnya diteapkan SK pensiun jandaduda oleh PPK. Kekurangan dokumen akan dimintakan kepada unit kerja atau janda / duda yang bersangkutan. Aplikasi ini dibuat sebagai upaya mengatasi permasalahan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengusulan pensiun janda/duda dari PNS yang meninggal dunia. Adanya keterlambatan pengusulan ini mengakibatkan keterlambatan pula dalam penetapan SK pensiun dan pembayaran hak pensiunnya. Aplikasi ini akan menjadi sarana penghubung antara PT.Taspen dengan BKD/BKPSDM/BKPP/ Instansi dan juga Kantor Regional III BKN Bandung, sehingga informasi PNS yang meninggal dunia dapat diketahui dengan cepat. Dengan demikian kita dapat menetapkan SK pensiun janda/duda tanpa harus menunggu usulan dari para janda/duda tersebut.

## **Integrasi Simpeg Instansi dengan SiASN**

Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan dalam rangka memberikan layanan terpadu, agar penyelesaian kepegawaian lebih cepat dan memangkas birokrasi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

### **C. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang telah direncanakan maka Kanreg III BKN membutuhkan anggaran, untuk tahun 2020 yang semula dianggarkan biaya sebesar Rp. 20.620.154.000,- (dua puluh milyar enam ratus dua puluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) namun dikarenakan ada penerimaan CPNS Tahun 2019 dan baru diadakan Test SKD dan SKB pada bulan Januari 2020 maka ada penambahan anggaran yaitu menjadi sebesar Rp. 23.917.682.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah ) digunakan membiayai 3 (tiga) program RPJMN yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Adapun rincian anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 16.905.154.000,- (enam belas milyar sembilan ratus lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah ).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara sebesar Rp. 4.562.528.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Rencana anggaran Kanreg III BKN tahun 2020 sebesar Rp. 23.917.682.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah ) tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang terdiri dari 3 jenis belanja, meliputi :

- A. Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.610.748.000,- (sepuluh milyar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- B. Belanja Barang sebesar Rp. 10.856.934.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- C. Belanja Modal sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

**Rincian anggaran belanja pada Kanreg III BKN sebagai berikut :**

SATUAN KERJA	JENIS PENGELUARAN			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
KANREG III BKN	10.610.748.000	. 10.856.934.000	2.450.000.000	23.917.682.000

**Tabel 3.1 Rincian Anggaran Belanja Kanreg III BKN**

**Rincian anggaran per program sebagai berikut :**

SATUAN KERJA	PROGRAM RPJM			JUMLAH
	DUKUNGAN	PENINGKATAN SARANA PRASARNA	PENYELENGGARAAN MANAJEMEN	
KANREG III BKN	16.905.154.000	2.450.000.000	4.562.528.000	23.917.682.000

**Tabel 3.2 Rincian Anggaran Belanja Per Program Kanreg III BKN**

#### **D. Penetapan Rencana Kerja**

Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara telah menyusun Penetapan Kerja tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penetapan Rencana Kerja Per Program Kegiatan Kanreg III BKN

NO	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	
				2020
<b>01:01</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKN</b>		Rp	16.905.154.000
<b>I</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>		Rp	354.710.000
<b>A</b>	<b>Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran</b>	<b>1 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>62.500.000</b>
1	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1 PKT	Rp	10.000.000
2	Penyusunan Penetapan Kinerja	1 PKT	Rp	10.000.000
3	Penyusunan Rencana Kerja	1 PKT	Rp	10.000.000
4	Penyusunan RKA-KL dan Revisi DIPA	1 PKT	Rp	25.000.000
5	Penyusunan RAB	1 PKT	Rp	7.500.000
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>6 DOK</b>	<b>Rp</b>	<b>45.000.000</b>
1	Penyusunan Laporan LAKIP Semester I dan Semester II	2 DOK	Rp	20.000.000
2	Penyusunan Laporan E-Monev (Triwulan I, II, III dan IV)	4 DOK	Rp	25.000.000
<b>C</b>	<b>Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan</b>	<b>3 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>52.670.000</b>
1	Pengadaan ATK dan Bahan Komputer	1 LAY	Rp	22.670.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	2 LAY	Rp	30.000.000
<b>D</b>	<b>Pengelolaan Kepegawaian</b>	<b>1 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>76.720.000</b>
1	Penilaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Analis Kepegawaian	1 PKT	Rp	6.720.000
2	Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	1 PKT	Rp	70.000.000
<b>E</b>	<b>Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan</b>	<b>2 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>117.820.000</b>
1	Penatausahaan BMN	1 LAY	Rp	19.680.000
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1 LAY	Rp	68.420.000
3	Protokol	1 LAY	Rp	29.720.000
<b>II</b>	<b>Layanan Dukungan Perkantoran</b>		Rp	16.550.444.000
<b>A</b>	<b>Gaji dan tunjangan</b>	<b>12 BLN LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>10.610.748.000</b>
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN LAY	Rp	10.610.748.000
<b>B</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>12 BLN LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>5.939.696.000</b>
1	Dokumen penyelenggaraan administrasi keuangan	1 BLN LAY	Rp	152.840.000
2	Layanan Sistem Akuntansi Instansi	1 BLN LAY	Rp	52.150.000
3	Laporan Pengelolaan Layanan Kesehatan	1 BLN LAY	Rp	145.500.000
4	Laporan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan	1 BLN LAY	Rp	4.400.000
5	Laporan Pelaksanaan Layanan Rumah Tangga	1 BLN LAY	Rp	1.747.915.000
6	Laporan Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	1 BLN LAY	Rp	81.600.000
7	Laporan Pengelolaan Layanan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 BLN LAY	Rp	781.520.000
8	Laporan Layanan Dayadan Jasa	1 BLN LAY	Rp	564.000.000
9	Pengelolaan Arsip dan Persuratan	1 BLN LAY	Rp	24.000.000
10	Laporan operasional perkantoran dan pimpinan	1 BLN LAY	Rp	300.064.000
11	Laporan perawatan gedung kantor	1 BLN LAY	Rp	991.375.000
12	Laporan pemeliharaan peralatan kantor	1 BLN LAY	Rp	1.094.332.000

<b>01:02</b>	<b>Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur BKN</b>		Rp	2.450.000.000
<b>I</b>	<b>Layanan Saran dan Prasarana Internal</b>			
<b>A</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>225.000.000</b>
1	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional Roda 4 (Empat)	3 UNIT	Rp	225.000.000
<b>B</b>	<b>Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi</b>	<b>1 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>127.976.000</b>
1	Mesin Scanner	3 UNIT	Rp	83.300.000
2	Mesin Printer	7 UNIT	Rp	4.464.000
3	Monitor PC 23	5 UNIT	Rp	40.212.000
<b>C</b>	<b>Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</b>	<b>1 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>97.024.000</b>
1	Meja Serbaguna	16 UNIT	Rp	49.872.000
2	AC Split 2 PK	3 UNIT	Rp	37.500.000
3	AC Split 1 PK	2 UNIT	Rp	9.652.000
<b>D</b>	<b>Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan</b>	<b>1 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>2.000.000.000</b>
1	Pengurugandan Pematatan Tanah		Rp	2.000.000.000
<b>06:00</b>	<b>Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara</b>			
<b>I</b>	<b>Layanan Kepegawaian pada Kantor Regional I-XIV BKN</b>		Rp	4.562.618.000
<b>A</b>	<b>Pelayanan pelaksanaan CAT Kantor Regional I-XIV BKN</b>	<b>1 LAY</b>	<b>Rp</b>	<b>3.342.528.000</b>
1	Pelayanan Kepegawaian Berbasis CAT		Rp	20.000.000
2	Pelaksanaan CAT UPT Serang		Rp	25.000.000
3	Persiapan Pelaksanaan Ujian Seleksi CPNS Formasi 2019		Rp	11.500.000
4	Pelayanan Kepegawaian Berbasis CAT		Rp	1.739.307.000
5	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Formasi 2019		Rp	1.456.721.000
6	Penetapan NIP		Rp	90.000.000
<b>B</b>	<b>Dokumen Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian</b>	<b>1 DOK</b>	<b>Rp</b>	<b>50.540.000</b>
	- Biaya Pengadaan ATK dan Bahan Komputer	1 PKT	Rp	20.540.000
	- Biaya Perjalanan Dinas	1 PKT	Rp	30.000.000
<b>C</b>	<b>Nota Persetujuan KP, PMK, dan mutasi lainnya Kanreg I-XIV BKN</b>	<b>71.452 NP</b>	<b>Rp</b>	<b>230.000.000</b>
	- Biaya ATK dan bahan komputer	4 PKT	Rp	195.000.000
	- Biaya Perjalanan Dinas	1 PKT	Rp	35.000.000
<b>D</b>	<b>Laporan Penetapan NIP CPNS</b>	<b>3.783 NIP</b>	<b>Rp</b>	<b>60.000.000</b>
	- Biaya Pengadaan ATK dan Bahan Komputer	2 PKT	Rp	50.000.000
	- Biaya Perjalanan Dinas	1 PKT	Rp	10.000.000
<b>E</b>	<b>Karis/karsu/karpeg yang ditetapkan</b>	<b>26203 KARTU</b>	<b>Rp</b>	<b>15.000.000</b>
	- Biaya Pengadaan ATK dan bahan komputer	1 PKT	Rp	15.000.000
<b>F</b>	<b>PERTEK/SK Pensiun yang ditetapkan</b>	<b>21896 Pertek/SK</b>	<b>Rp</b>	<b>230.000.000</b>
	- Biaya Pengadaan ATK dan Bahan Komputer		Rp	195.000.000
	- Biaya Perjalanan Dinas		Rp	35.000.000
<b>G</b>	<b>Bimbingan Teknis Kepegawaian</b>	<b>5 DOK</b>	<b>Rp</b>	<b>554.550.000</b>
1	<b>PENYELENGGARAAN SOSIALISASI / WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/ PUBLIKASI</b>		Rp	474.550.000

	- Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian		Rp	85.650.000
	- Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelesaian Layanan Kepegawaian Tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020		Rp	278.800.000
	- Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Zonal Integritas		Rp	110.100.000
<b>2</b>	<b>BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN</b>	<b>1 PKT</b>	Rp	80.000.000
	- Biaya Pengadaan ATK dan bahan computer		Rp	40.000.000
	- Biaya Perjalanan Dinas		Rp	40.000.000
<b>H</b>	<b>Tata Naskah Kepegawaian yang di Kelola</b>	<b>120.000 TATA NASKAH</b>	<b>Rp</b>	<b>80.000.000</b>
	- Biaya Pengadaan ATK dan Bahan Komputer	1 PKT	Rp	45.000.000
	- Biaya Perjalanan Dinas	1 PKT	Rp	35.000.000

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini sangat penting untuk diperhatikan agar hasil yang akan dicapai organisasi langsung dapat dirasakan atau setidaknya memiliki pengaruh yang positif bagi tumbuh dan berkembangnya akuntabilitas publik.

Analisis yang menyeluruh mengenai kemampuan SDM, sarana dan prasarana, anggaran, serta analisis lainnya yang diperlukan sebaiknya dilaksanakan dengan cermat guna menghindari adanya penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya. Walaupun kekurangan faktor-faktor kebutuhan dapat disesuaikan sehingga sasaran dapat tercapai secara optimal, namun hendaknya organisasi tetap melakukan penetapan sasaran secara optimal sesuai dengan tujuan dari pihak yang berkepentingan.

Suatu sistem pengumpulan dan pengesahan data rencana kerja yang baik diperlukan agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pengumpulan data yang baik dibutuhkan dalam rangka menyajikan data yang akurat, cepat serta tepat bagi pemberian data untuk digunakan dalam penyusunan rencana stratejik, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas serta evaluasinya.

Dengan penyusunan rencana kerja yang matang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada maka program dan kegiatan yang ditetapkan untuk rentang waktu 1 tahun oleh Kantor Regional III BKN diharapkan dapat dicapai dengan baik dan bersamaan dengan itu terus dilakukan usaha perbaikan yang terus menerus.

# LAMPIRAN

**REKAP 3: KEGIATAN K/L  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA:** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
- 2. PROGRAM:** 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN
- 3. SASARAN PROGRAM:** 01 - Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN
- 4. KEGIATAN:** 3636 - Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya Kanreg dan Satker
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2):** Kantor Regional Bandung BKN
- 6. SASARAN KEGIATAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
1	<b>Meningkatkan kualitas layanan operasional di Kantor Regional Bandung</b>		16.905.154,00
01.01	Indeks kepuasan pegawai atas layanan operasional di Kantor Regional Bandung	Baik	
<b>Total</b>			<b>16.905.154,00</b>





KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWA CITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATE N / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									10.610.748,00
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									5.939.696,00
<b>Total</b>												16.905.154,00



1.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								000 - Bukan Tematik	tidak	2.450.000,00
1.951.001	Tanpa Sub Output										2.450.000,00
	051 - Pengadaan kendaraan bermotor										
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								225.000,00
	052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi										
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								127.976,00
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran										
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								97.024,00
	054 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan										
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								2.000.000,00
	055 - Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan										0
<b>Total</b>											2.450.000,00

**REKAP 3: KEGIATAN K/L  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kantor Regional III BKN

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2. PROGRAM: 06 - Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
3. SASARAN PROGRAM: 01 - Meningkatkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang optimal  
02 - Meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi  
03 - Terwujudnya sistem informasi manajemen ASN yang terintegrasi dan pengelolaan arsip kepegawaian yang komprehensif  
04 - Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian  
05 - Terwujudnya sistem perencanaan pegawai, seleksi CPNS, dan pembinaan karier ASN yang tepat, obyektif, dan transparan.  
06 - Mewujudkan ASN yang profesional.
4. KEGIATAN: 3658 - Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional I - XIV BKN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2): Kantor Regional III BKN

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
1	Layanan kepegawaian Kantor Regional I-XIV BKN sesuai norma, standar, dan prosedur.	0	1,102,000.00
1:01	Persentase penyelesaian pelayanan mutasi kepegawaian dalam durasi 10 hari kerja	100%	
1:02	Jumlah kegiatan supervisi dan atau fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian	70	
1:03	Persentase arsip kepegawaian yang dikelola dalam tata naskah sesuai target .	100%	
1:04	Persentase penyelesaian pelayanan pensiun tepat waktu (dibawah 10 hari kerja)	1	
1:05	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dengan Sistem CAT yang sesuai target	100%	
1:06	Persentase Penyelesaian Penetapan NIP CPNS	100	
1:07	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Assessment Center Berdasarkan Permintaan Instansi	10000%	

1:08	Persentase Penyelesaian Penetapan KARPEG/KARIS/KARSU	100	
<b>Total</b>			1,102,000.00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
1	Layanan kepegawaian Kantor Regional I-XIV BKN sesuai norma, standar, dan prosedur.											1,102,000.00
1,001	Layanan Kepegawaian pada								000 - Bukan		tidak	166,500.00
1,001,001	Tanpa Sub Output											166,500.00
	051 - Pelayanan pelaksanaan CAT Kantor Regional I-XIV BKN											45,000.00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									45,000.00
	052 - Pelayanan Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional I-XIV BKN											121,500.00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									121,500.00
1,009	Dokumen Penyelesaian								000 - Bukan		tidak	121,500.00



	051 - Laporan Penetapan Karis/Karsu/Karpeg											121,500.00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									121,500.00
1,013	PERTEK/SK Pensiun yang ditetapkan								000 - Bukan		tidak	121,500.00
1,013,001	Tanpa Sub Output											121,500.00
	051 - Penetapan PERTEK/SK Pensiun											121,500.00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									121,500.00
1,014	Bimbingan Teknis Kepegawaian								000 - Bukan		tidak	206,500.00
1,014,001	Tanpa Sub Output											206,500.00
	051 - Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi											121,500.00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									121,500.00
	052 - Pelaksanaan Bimbingan teknis kepegawaian											85,000.00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									85,000.00
1,015	Tata Naskah Kepegawaian yang								000 - Bukan		tidak	121,500.00

1,015,001	Tanpa Sub Output											121,500.00
	051 - Pengelolaan tata naskah											121,500.00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									121,500.00
<b>Total</b>												<b>1,102,000.00</b>